



**SALINAN**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

STANDAR PENAMAAN FILE DOKUMEN, TATA KELOLA PENGARSIPAN FILE FOTO,  
VIDEO, DAN AUDIO SERTA STANDAR PEWARNAAN HURUF PADA FILE  
KOMPILASI REGULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi standar penamaan file dokumen, tata kelola pengarsipan file foto, video, dan audio serta standar pewarnaan huruf pada file kompilasi regulasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020, perlu menetapkan Standar penamaan file dokumen, tata kelola pengarsipan file foto, video, dan audio serta standar pewarnaan huruf pada file kompilasi regulasi;

b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PENAMAAN FILE DOKUMEN, TATA KELOLA PENGARSIPAN FILE FOTO, VIDEO, DAN AUDIO SERTA STANDAR PEWARNAAN HURUF PADA FILE KOMPILASI REGULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- KESATU : Menetapkan standar penamaan file dokumen, tata kelola pengarsipan file foto, video, dan audio serta standar pewarnaan huruf pada file kompilasi regulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- KEDUA : standar penamaan file dokumen, tata kelola pengarsipan file foto, video, dan audio serta standar pewarnaan huruf pada file kompilasi regulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandungan  
Pada tanggal 01 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran I: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
NOMOR 13/HK.03.01-Kpt/6306/KPU-Kab/VII/2021  
Tanggal 01 Juli 2021

### FORMAT STANDAR PENAMAAN FILE

Tujuan standarisasi format penamaan file:

- Agar mudah dicari.
- Cepat kita ketahui isi dari file tersebut hanya dengan melihat nama file nya saja.
- Walaupun dicampur dengan file-file lainnya, file-file itu tetap tersusun rapi berurutan berdasarkan waktu (tahun, bulan, dan tanggal) dikeluarkannya dokumen dimaksud.
- Memudahkan membuat laporan berdasarkan waktu pelaksanaan.
- Memudahkan menyusun bukti dukung dalam permasalahan hukum.

Petunjuk:

- Singkatan nama lembaga lihat di Lampiran II
- Huruf berwarna merah dan ungu pada lampiran I kolom “FORMAT PENAMAAN FILE” ini hanya sebagai media untuk mempermudah pemahaman pembaca bahwa:
  - kata yang berwarna ungu itu adalah kata yang sudah permanen contoh: “UU-No” harus tetap ditulis “UU-No”
  - kata yang berwarna merah itu diisi sesuai kasusnya. Contoh: “Tahun” bisa ditulis “2020, atau 2021 dan lainnya sesuai tahun dikeluarkannya dokumen aturan dimaksud.

NO	KATEGORI FILE	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			REGULASI / DOKUMEN	NAMA FILE
1	Undang-Undang	[Tahun]-UU-No [nomor]-[perihal]	Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	2017-UU-No 7-Pemilu
2	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	[Tahun]-PERPU-No [nomor]-[perihal]	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	2020-PERPU-No 2-RUBAH ke 3 UU 1 th 2015 ttg penetapan PERPU menjadi UU Pilkada

NO	KATEGORI FILE	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			REGULASI / DOKUMEN	NAMA FILE
3	a Peraturan Peraturan Pemerintah	[Tahun]-PP-No [nomor]-[perihal]	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	2012-PP-No 28- Pelaksanaan UU No 43 Th 2009 ttg Kearsipan
	b Peraturan Presiden	[Tahun]-Perpres- No [nomor]- [perihal]	Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2018-Perpres-no 105-Tupoksi Set KPU, KPU Prov, KK
	c PKPU	[Tahun]-PKPU- No [nomor]- [perihal]	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2020-PKPU-No 14- Tupoksi Setjen KPU, Set KPU Prov & Kab Kota
	d Peraturan lainnya	[Tahun]-P [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang tata ara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	2020-P BWL-no 2- tata cara penyelesaian sengketa Pilkada
	e Peraturan Bersama	[Tahun]-P Bersama [singkatan nama-nama lembaga yg terlibat]-No [nomor regulasi salah satu pihak]-[perihal]	Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016, nomor 01 tahun 2016, nomor 013/JA/11/2016 tentang	2016-P Bersama BWL, POLRI, JA-No 14-Sentra penegakan hukum terpadu pada Pilkada

NO	KATEGORI FILE	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			REGULASI / DOKUMEN	NAMA FILE
			sentra penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
4	Putusan	[Tahun]-Putusan [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 124/PHP.GUB-XIX/2021	2021-Putusan MK-no 124-Denny vs KPU Kalsel (Pilgub 2020)
5	a Keputusan lembaga	[Tahun]-SK [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 290/PP.06.- Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program desa peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	2021-SK KPU-No 290-Juklak program desa peduli Pemilu Pilkada
	b Keputusan Sekretariat Lembaga	[Tahun]-SK [singkatan nama lembaga] -(sek)-No [nomor]-[perihal]	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 366/SDM.05.5- Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2021-SK KPU (Sek)-No 366-pengangkatan & pemberhentian jabatan pada Set KPU, Prov, KK
6	MoU (Nota kesepahaman)	[Tahun]-MoU [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Perjanjian kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2020-MoU KPU HSS, Dinkes & Satgas Covid-No 1-dukungan layanan kesehatan bagi penyelenggara Pilgub 2020

NO	KATEGORI FILE	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			REGULASI / DOKUMEN	NAMA FILE
			tentang dukungan pelayanan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020	
7	a Pengumuman Pengumuman lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]- Pengumuman [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum nomor 54/PT.01.5-PU/01/KPU/IX/2019 tentang Call For Paper evaluasi Pemilu serentak 2019	2019-9-16- Pengumuman KPU- no 54-Call for paper evaluasi pemilu 2019
	b Pengumuman Sekretariat lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]- Pengumuman [singkatan nama lembaga] (sek)- No [nomor]- [perihal]	Pengumuman Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor 1/HM.07-PU/06/Teknis/ I/I/2020 tentang lomba cipta aplikasi alat peraga (permainan) kepemiluan dalam rangka pendidikan pemilih untuk menyukseskan pemilihan serentak tahun 2020	2020-1-14- Pengumuman KPU (sek)-No 1-Lomba Game Kepemiluan
8	a Berita Acara Berita Acara Lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]-BA [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor: 26/PL.02-BA/6306/KPU-Kab/XIII/2020 tentang pemusnahan surat suara yang melebihi kebutuhan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020	2020-12-8-BA KPU HSS-No 26- pemusnahan surat suara berlebih Pilgub 2020
	B Berita Acara Sekretariat Lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]-BA [singkatan nama lembaga] (sek)- No [nomor]-	Berita Acara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor: 2/PL.02-BA/6306/KPU-Kab/XII/2015 tentang	2015-1-20-BA KPU HSS (sek)-No 2- penunjukan penyedia logistik di TPS

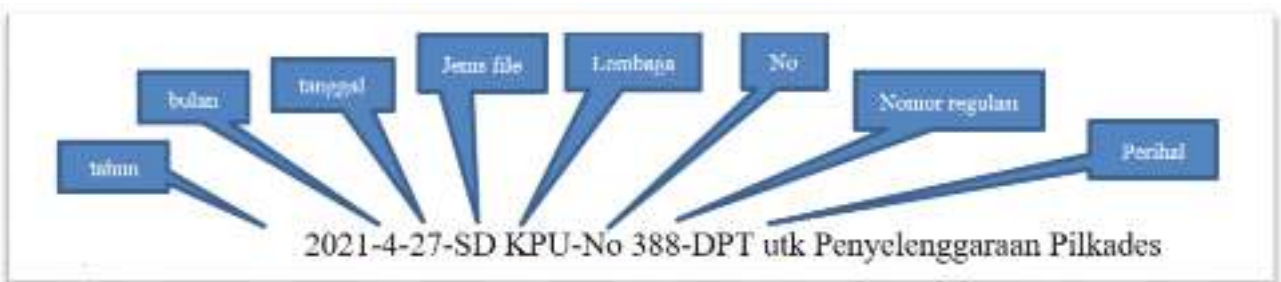
NO	KATEGORI FILE	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			REGULASI / DOKUMEN	NAMA FILE
		[perihal]	penunjukan penyedia logistik di Tempat Pemungutan Suara	
9	Surat Edaran a Surat Edaran Lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]-SE [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Surat edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2021 tentang Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama pandemi covid-19 bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada bulan ramadhan 1442 H	2021-5-3-SE KPU-No 7-Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik Bagi Ketua & Anggota KPU
	b Surat Edaran Sekretariat Lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]-SE [singkatan nama lembaga] (sek)-No [nomor]-[perihal]	Surat edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2021 tentang Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama pandemi covid-19 bagi Aparatur Sipil Negara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada bulan ramadhan 1442 H	2021-5-3-SE KPU (sek)-No 8-Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik Bagi ASN KPU
	c Surat Edaran Bersama	[Tahun-Bulan-Tanggal]-SE Bersama [singkatan nama-nama lembaga yg terlibat]-No [nomor]-[perihal]	Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 55-0870/K-BAWASLU/PM.OO.OO/4/2009, nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS	2019-4-16-SE Bersama KPU & Bawaslu-No 4-penyelenggaraan ngutungsura di TPS
10	Surat Dinas			
	a Surat Dinas Lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]-SD [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 388/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyelenggaraan Pemilihan	2021-4-27-SD KPU-No 388-DPT utk Penyelenggaraan Pilkades

NO	KATEGORI FILE	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			REGULASI / DOKUMEN	NAMA FILE
			Kepala Desa (Pilkades)	
b	Surat Dinas Sekretariat Lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]-SD [singkatan nama lembaga] (sek)-No [nomor]-[perihal]	Surat dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1/SDM.03.1-SD/05/SDMI/CC/2021 tanggal 2 februari 2021 perihal pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar LKPP tahun 2021	2021-2-2-SD KPU (sek)-no 1-Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Tingkat Dasar LKPP Tahun 2021
11	Undangan			
a	Undangan Lembaga	[Tahun-Bulan-Tanggal]-SD [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-UND ([perihal])	Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 231/TIK.02-SD/01/KPU/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Himbauan mengikuti webinar (tentang daftar pemilih berkelanjutan)	2021-3-17-SD KPU-no 231-UND (webinar DP Berkelanjutan)
b	Undangan KPU Prov. Kal-Sel	[Tahun-Bulan-Tanggal]-SD [singkatan nama lembaga] (sek)-No [nomor]-UND ([perihal])	Surat dinas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 123/PR.06-Und/63/Prov/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Undangan (Kunjungan kerja komisi II DPR RI)	2021-3-25-SD KPU Kalsel (sek)-No 123-UND (Kunker komisi II DPR RI)
12	SOP (Standar Operational Prosedur)	[Tahun]-SOP [singkatan nama lembaga]-[perihal]	Standard Operating Procedure (SOP) Petugas Penerima Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020	2020-SOP KPU HSS-Petugas pendaftaran calon PPK Pilgub 2020
13	Notulen Rapat	[Tahun-Bulan-Tanggal]-Notulen Rapat [singkatan nama lembaga]-[perihal]	Rapat rutin (mingguan) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 maret 2021	2021-3-17-Notulen Rapat KPU HSS
14	Rapat dengar pendapat	[Tahun-Bulan-Tanggal]-RDP [singkatan nama-nama lembaga yg terlibat]-[perihal]	Kesimpulan rapat kerja/dengar pendapat komisi II DPR RI dengan Meneri Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan	2020-9-21- RDP DPR, KPU, Bawaslu, Kemendagri-Pelaksanaan Hari H Pilkada 2020

NO	KATEGORI FILE	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			REGULASI / DOKUMEN	NAMA FILE
			Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Senin, 21 september 2020	
15	Siaran pers	[Tahun-Bulan-Tanggal]-Siaran pers [singkatan nama lembaga]-[perihal]	Siaran pers Komisi Pemilihan Umum RI. Rapat pleno anggota KPU RI menyepakati Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI definitif	2021-Siaran pers KPU-Penetapan Ilham sebagai Ketua Definitif
16	Keterangan pers	[Tahun-Bulan-Tanggal]-Keterangan pers [singkatan nama lembaga]-[perihal]	Keterangan Pers Komisi Hak Asasi Manusia nomor 038/Humas/KH/IX/2020 Untuk menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan publik tunda tahapan Pilkada 2020	2020-Keterangan pers -KHAM-no 38-jamin hak keselamatan publik tunda Pilkada 2020
17	Rilis	[Tahun-Bulan-Tanggal]-Rilis [singkatan nama lembaga]-[perihal]	Rilis DKPP RI (tentang status Evi di KPU RI)	2021-Rilis DKPP-tentang status Evi di KPU RI
18	Surat perintah	[Tahun-Bulan-Tanggal]-Perintah [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Surat perintah Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan nomor Sprin/286/III/PAM.3.3/2021 (pengamanan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	2021-3-18-S Perintah KAPOLRES HSS-No 286-pengamanan kantor KPU HSS
19	Radiogram	[Tahun-Bulan-Tanggal]-Radiogram [singkatan nama lembaga]-[perihal]	Radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (tanggal 7 desember 2020 perihal rakor kesiapan pemungutan suara Pilkada serentak)	2020-12-7-Radiogram MENDAGRI-Rakor Kesiapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak
20	Surat pengantar	[Tahun-Bulan-Tanggal]-S Pengantar [singkatan nama lembaga]-No [nomor]-[perihal]	Surat pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 216/RT/01.2-SR/6306/Sek-Kab/VIII/2020	2020-9-8-S Pengantar KPU HSS-No 216-Laporan Kebutuhan Kotak & Bilik Suara Pilkada 2020
21	Kompilasi regulasi	[Tahun regulasi perubahan terakhir]-Kompilasi [jenis regulasi]-No	Kompilasi Regulasi tentang Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan	2020-Kompilasi UU No 1, 8 Th 2015, 10 Th 2016, Perpu No 2 Th 2020-Pilkada

NO	KATEGORI FILE	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			REGULASI / DOKUMEN	NAMA FILE
		[nomor & tahun regulasi-regulasi yg dikompilasi]-[perihal]	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan perubahannya (Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020)	
22	Rangkuman regulasi	[Tahun]-[jenis regulasi]-No [nomor]-[perihal] ..... (RANGKUMAN)	Rangkuman KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota	2021-SK KPU-No 290-Juklak program desa peduli Pemilu Pilkada ..... (RANGKUMAN)
23	File penting lainnya	[Tahun-Bulan-Tanggal]-[uraian singkat file]	Data kepegawaian KPU Kab. HSS tahun 2021	2021-6-5-data kepegawaian KPU HSS th 2021

Ilustrasi format penamaan file:



**CATATAN:**

A. Tambahkan kode “(d)” di akhir nama file bila regulasi/dokumen dimaksud sudah mengalami perubahan (beberapa pasal/sebagian isinya dirubah oleh regulasi/dokumen lainnya).

Contoh:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak

lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (COVID-19)

Filenya diberi nama:

2020-PKPU-No 10-RUBAH PKPU 6 Th 2020 ttg Pilkada Lanjutan di Masa Covid (d)

B. Ganti kata “perubahan” menjadi “RUBAH” pada regulasi yang mengubah regulasi sebelumnya.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Filenya diberi nama:

2020-PERPU-No 2-RUBAH ke 3 UU 1 th 2015 ttg penetapan PERPU menjadi UU Pilkada

C. Tambahkan kode “(X)” di akhir nama file bila regulasi/dokumen dimaksud sudah tidak berlaku lagi.

Contoh:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Filenya diberi nama:

2007-PKPU-No 10-Rekapitulasi Suara Pilkada (X)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran II: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
 NOMOR 13/HK.03.01-Kpt/6306/KPU-Kab/VII/2021  
 Tanggal 01 Juli 2021

**DAFTAR SINGKATAN NAMA-NAMA LEMBAGA**

NO	KATEGORI FILE	SINGKATAN
<b>A</b>	<b>Penyelenggara Pemilu Dan Sekretariatnya</b>	
1	KPU RI	KPU
2	Sekretariat jenderal KPU RI	KPU (sek)
3	KPU Provinsi Kalimantan Selatan	KPU Kalsel
4	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	KPU Kalsel (sek)
5	KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	KPU HSS
6	Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	KPU HSS (sek)
7	Bawaslu RI	BWL
8	Sekretariat Jenderal Bawaslu RI	BWL (sek)
9	Bawaslu Prov Kal-Sel	BWL Kalsel
10	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	BWL Kalsel (sek)
11	Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	BWL HSS
12	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	BWL HSS (sek)
13	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	DKPP
14	Panitia Pemilihan Kecamatan .....	PPK [.....singkatan nama kecamatan.....]  Contoh untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Raya: Ditulis : PPK SR
15	Panitia Pemungutan Suara .....	PPS [.....singkatan nama desa/kelurahan.....]  Contoh untuk Panitia Pemungutan Suara desa Mandala Murung Masjid Ditulis: PPS MMM
16	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara .....	KPPS [.....nomor TPS + singkatan nama desa.....]  Contoh untuk KPPS 1

NO	KATEGORI FILE	SINGKATAN
		Kelurahan Kandungan Kota Ditulis: KPPS 1 Kan Kota
17	Panitia Pengawas Kecamatan .....	Panwascam [.....singkatan nama kecamatan]  Contoh untuk Panwascam Loksado Ditulis: Panwascam Lok
18	Pengawas Kelurahan/Desa .....	PKD [.....singkatan nama desa/kelurahan .....]  Contoh untuk Pengawas Kelurahan/Desa Wasah Tengah Ditulis: PKD WT
19	Pengawas TPS .....	PTPS [nomor TPS + singkatan desa/kelurahan .....]  Contoh untuk Pengawas TPS 5 desa Baluti Ditulis: PTPS 1 Blt
<b>B</b>	<b>Partai Politik</b>	
1	Partai Amanat Nasional	PAN
2	Partai Berkarya	Berkarya
3	Partai Bhineka Indonesia	PBI
4	Partai Bulan Bintang	PBB
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPI-P
6	Partai Demokrat	Demokrat
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra
8	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	Garuda
9	Partai Golongan Karya	Golkar
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Hanura
11	Partai Indonesia Kerja	PIKA
12	Partai Islam Damai Aman	Idaman
13	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
14	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
15	Partai Nasional Demokrat	Nasdem
16	Partai Keadilan Dan Perasatuan Indonesia	PKPI
17	Partai Pemersatu Bangsa	PPB
18	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	PPPI
19	Partai Persatuan Indonesia	Perindo
20	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
21	Partai Rakyat	P Rakyat
22	Partai Reformasi	P Reformasi
23	Partai Republik	P Republik
24	Partai Republik Nusantara	Republikan

NO	KATEGORI FILE	SINGKATAN
25	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
26	Partai Suara Rakyat Indonesia	Parsindo
27	Partai Nasional Indonesia Marhaenis	PNI Marhaenis
<b>C</b>	<b>Lembaga lainnya yang sering berhubungan dengan KPU</b>	
1	Presiden	Pres
2	Gubernur Kalimantan Selatan	Gub Kalsel
3	Bupati Hulu Sungai Selatan	Bup HSS
4	Mahkamah Konstitusi	MK
5	Mahkamah Agung	MA
6	Pengadilan Tata Usaha Negara	PTUN
7	Kejaksaan Negeri Kandungan	Kajari HSS
8	Pengadilan Negeri Kandungan	PN HSS
9	Kantor Kementerian Agama HSS	Kemenag HSS
10	Dewan Perwakilan Rakyat HSS	DPRD HSS
11	Badan Intelijen Negara	BIN
12	Badan Kepegawaian Negara	BKN
13	Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah	LKPP
14	Komisi Hak Asasi Manusia	KHAM
<b>D</b>	<b>Kementerian</b>	
1	Menteri koordinator bidang hukum, politik, dan keamanan	Menkopolhukam
2	Menteri koordinator bidang perekonomian	Menko ekon
3	Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Menko PMK
4	Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi	Menko KI
5	Menteri sekretaris negara	Mensesneg
6	Menteri dalam negeri	Mendagri
7	Menteri luar negeri	Menlu
8	Menteri pertahanan	Menhan
9	Menteri hukum dan HAM	Menkumham
10	Menteri keuangan	Menkeu
11	Menteri energi dan sumber daya mineral	MenESDM
12	Menteri perindustrian	Menperind
13	Menteri perdagangan	Mendag
14	Menteri pertanian	Mentan
15	Menteri lingkungan hidup dan kehutanan	Menhut
16	Menteri perhubungan	Menhub
17	Menteri kelautan dan perikanan	Men KP
18	Menteri tenaga kerja	Menakertrans
19	Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi	MenPDT
20	Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Men PU

NO	KATEGORI FILE	SINGKATAN
21	Menteri kesehatan	Menkes
22	Menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi	Mendikbud
23	Menteri investasi	Meninves
24	Menteri sosial	Mensos
25	Menteri agama	Menag
26	Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif	Menparekraf
27	Menteri komunikasi dan informatika	Menkominfo
28	Menteri koperasi dan UKM	Men KUKM
29	Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Men PPPA
30	Menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi	Menpan RB
31	Menteri PPN/Kepala Bappenas	MenPPN
32	Menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN	Men BPN
33	Menteri BUMN	Men BUMN
34	Menteri pemuda dan olahraga	Menpora
<b>E</b>	<b>TNI-Polri</b>	
1	Kepolisian Republik Indonesia	POLRI
2	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	POLDA Kalsel
3	Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan	POLRES HSS
4	Kepolisian Sektor .....	POLSEK .....
5	Markas besar Tentara Nasional Indonesia	TNI
6	Komando Daerah Militer .....	KODAM .....
7	Komando Resor Militer Banjarmasin	KOREM Kalsel
8	Komando Distrik Militer 1003 Kandungan	KODIM HSS
9	Komando Rayon Militer .....	KORANMIL .....
<b>F</b>	<b>OPD Lingkup Pemkab. HSS</b>	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	D.Dik HSS
2	Dinas Kesehatan	D.Kes HSS
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	D.Pera HSS
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	D.Kominfo HSS
5	Dinas Pertanian	D.Tan HSS
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	D.PU HSS
7	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	D.Naker HSS
8	Dinas Sosial	D.Sos HSS
9	Dinas Ketahanan Pangan	D.KP HSS
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	D.Dukcatpil HSS
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	D.PMD HSS
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D.KB HSS
13	Dinas Perhubungan	D.Hub HSS
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	D.1 pintu HSS

NO	KATEGORI FILE	SINGKATAN
	Terpadu Satu Pintu	
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	D.Perpus HSS
16	Dinas Perikanan	D.Ikan HSS
17	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	D.Porapar HSS
18	Dinas Perdagangan	D.Dag HSS
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	B.Pelitbangda HSS
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	BPKPD HSS
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM HSS
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD HSS
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B.Kesbangpol HSS
24	Sekretariat Daerah	Setda HSS
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Setwan HSS
26	Inspektorat Daerah;	Itda HSS
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;	Satpol PP HSS
28	Kecamatan	Kec
<b>G</b>	<b>Kecamatan</b>	
1	Kandangan	Kan
2	Sungai Raya	SR
3	Padang Batung	PB
4	Loksado	Lok
5	Angkinang	Ang
6	Kalumpang	Kal
7	Simpur	Sim
8	Telaga Langsung	TL
9	Daha Utara	DU
10	Daha Selatan	DS
11	Daha Barat	DB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



NIDA GUSLAILI RAFMADINA

Lampiran III: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
NOMOR 13/HK.03.01-Kpt/6306/KPU-  
Kab/VII/2021  
Tanggal 01 Juli 2021

### **STANDARISASI PENGARSIPAN FILE FOTO, SERTA FILE VIDEO, DAN AUDIO**

#### Tujuan:

- Memudahkan kita untuk mencari dan menemukan dengan cepat foto, video, dan/atau audio yang kita inginkan.
- Cepat kita ketahui isi dari folder foto, video atau audio tersebut hanya dengan melihat nama foldernya saja.
- Walaupun dicampur dengan folder-folder lainnya, folder-folder foto, video, atau audio itu tetap tersusun rapi berurutan berdasarkan waktu (tahun, bulan, dan tanggal) kapan dibuatnya foto, video, dan/atau audio dimaksud.
- Memudahkan membuat lampiran laporan berupa foto, video atau audio berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
- Memudahkan menyusun bukti dukung dalam permasalahan hukum.

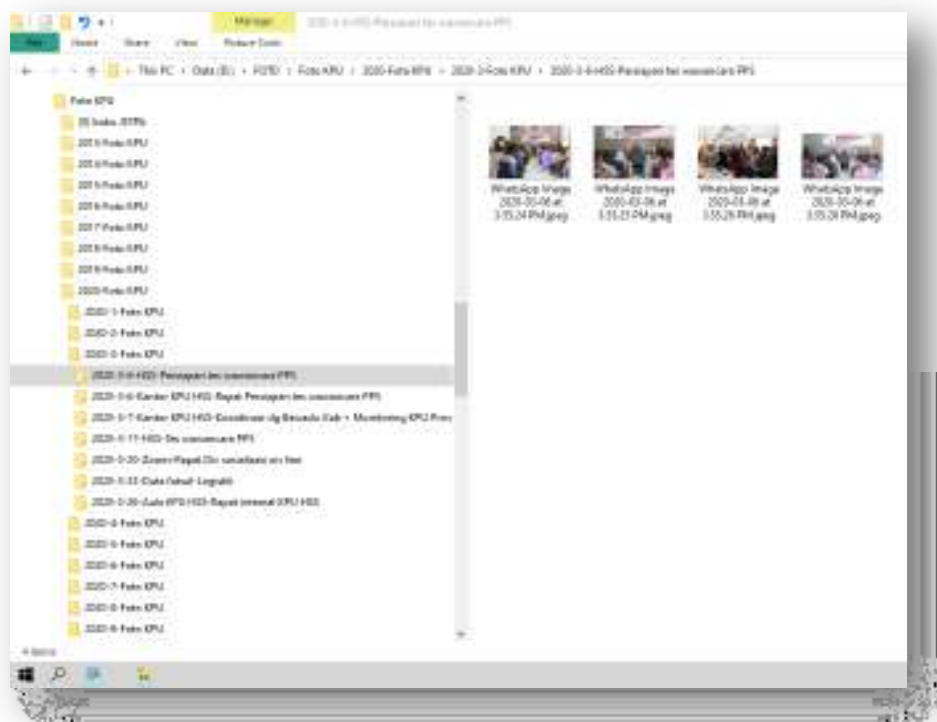
Untuk pengarsipan file-file foto, yang diberi nama ulang (rename) cukup foldernya saja karena terlalu banyak foto yang mendokumentasikan kegiatan yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Sedangkan untuk pengarsipan file-file video dan audio yang diberi nama ulang (rename) adalah folder tempat penyimpanannya dan file video dan audio dimaksud.

Ketentuan penamaan arsip foto serta video dan audio adalah sebagai berikut:

#### **A. ARSIP FILE FOTO**

NO	KATEGORI	FORMAT PENAMAAN FOLDER	CONTOH	
			DESKRIPSI FOTO	NAMA FOLDER
1	Foto kegiatan 1 hari	[Tahun-Bulan-Tanggal]-[lokasi kegiatan]-[keterangan singkat foto]	Tanggal 15 Februari 2020, berlokasi di Hoel Grand Tulip Banjarmasin, KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat koordinasi pembentukan sekretariat PPK dan sekretariat PPS	2020-2-15-Hotel Grand Tulip Bjm-Rakor pembentukan sekretariat PPK, PPS
2	Foto kegiatan lebih dari 1 hari	[Tahun-Bulan-Tanggal awal sd Tanggal akhir]-[lokasi kegiatan]-[keterangan singkat foto]	Tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 2020, bertempat di hotel Golden Tulip Banjarmasin, KPU Provinsi Kalimantan	2020-12-17 sd 18-Hotel Golden Tulip Bjm-Pleno Tungsura tk Prov

NO	KATEGORI	FORMAT PENAMAAN FOLDER	CONTOH	
			DESKRIPSI FOTO	NAMA FOLDER
			Selatan mengadakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 tingkat Provinsi.	
3	Foto non kegiatan yang terkait dengan jadwal tahapan	[Tahun]-[keterangan singkat foto]	Koleksi foto anggota DPR RI periode 2019-2024 yang pengambilan gambarnya/pembuatan info grafisnya dilakukan di awal masa menjabat (tahun 2019)	2019-Personil DPR RI periode 2019-2024
4	Foto non kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan jadwal tahapan	[keterangan singkat foto]	Kumpulan foto atau gambar berkarakter figure kartun dengan tema seputar kepemiluan	Kartun Pemilu



## B. ARSIP FILE VIDEO DAN AUDIO

NO	KATEGORI	FORMAT PENAMAAN FILE	CONTOH	
			DESKRIPSI FILE	NAMA FILE
1	Video	[Tahun-Bulan-Tanggal]-[lokasi video atau pembuat video]-[keterangan singkat tentang isi video]	Tanggal 9 Desember 2020, KPU Kab. HSS membuat video sosialisasi tentang hal-hal baru di TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020	2020-12-9-KPU HSS-Hal baru Di TPS Pilkada 2020
2	Audio	[Tahun-Bulan-Tanggal]-[lokasi video atau pembuat video]-[keterangan singkat tentang isi video]	Tanggal 8 Desember 2020, KPU Kab. HSS memutar audio sosialisasi hari H Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 di terminal bus Kandangan dengan konsep ala pengumuman di maskapai pesawat	2020-12-8-KPU HSS-Sosialisasi Hari H Pilgub Kalsel ala Maskapai Pesawat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



NIDA GUSLAILI RAI MADINA

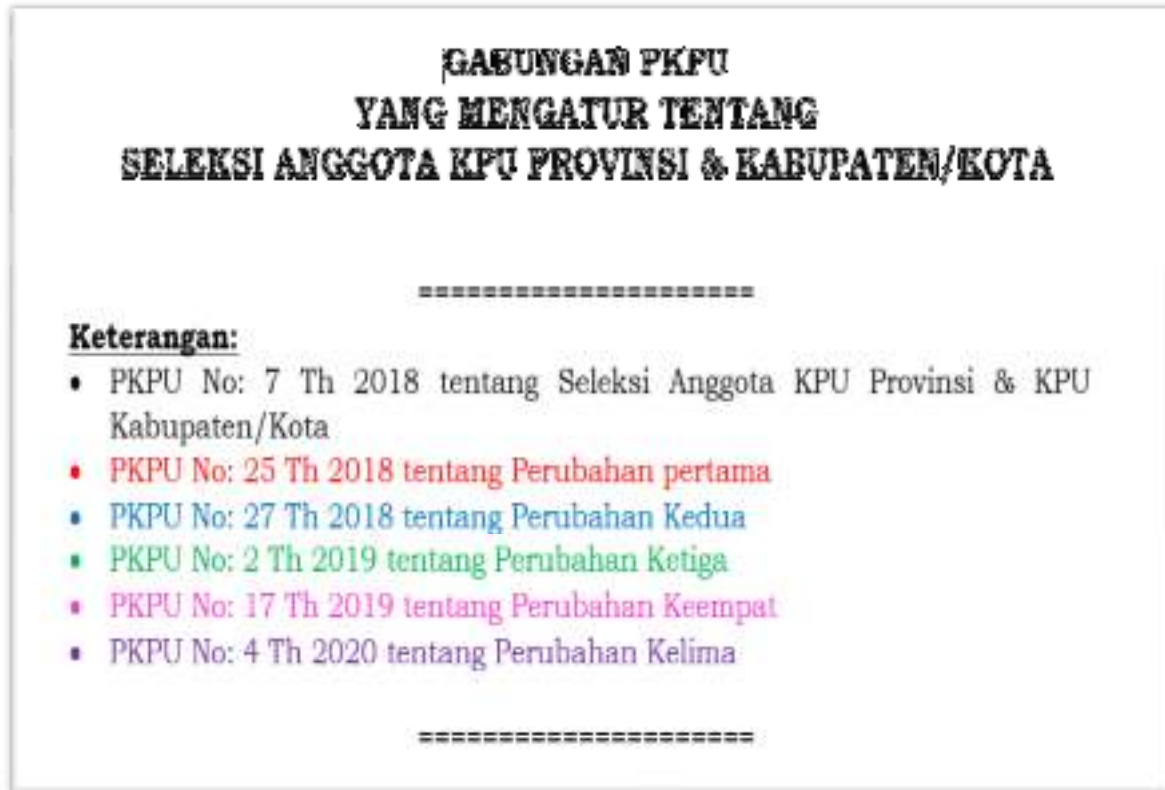
## STANDAR FORMAT PEWARNAAN HURUF UNTUK FILE KOMPILASI REGULASI

Semakin banyak regulasi yang dirubah oleh regulasi selanjutnya maka akan semakin merepotkan bagi para pembaca untuk mengetahui regulasi mana saja yang mengubah suatu aturan serta pasal mana saja yang masih berlaku dan yang mana yang sudah tidak berlaku lagi. Untuk memudahkan pencermatan dari regulasi awal sampai dengan perubahan terakhir dari regulasi awal dimaksud, kita sering membuat file kompilasi, yaitu gabungan regulasi-regulasi dalam 1 (satu) naskah dengan tetap mencantumkan pasal-pasal yang masih berlaku, mencoret / menghapus pasal-pasal yang sudah tidak berlaku lagi dan mencantumkan pasal-pasal perubahannya, sehingga para pembaca tidak perlu repot bolak-balik antar file/naskah regulasi dan meminimalisir kesalahan pencomotan pasal-pasal yang sudah tidak berlaku lagi.

Untuk lebih mempermudah para pembaca dalam menandai isi yang tertera pada file kompilasi itu berasal dari regulasi yang mana, maka sebagian besar para pembuat file kompilasi memberikan tanda berupa warna untuk masing-masing sumber regulasi. Agar tidak terjadi kebingungan dan salah tafsir dan memudahkan kolaborasi antar sumber pembuat file kompilasi maka di bawah ini ditetapkan ketentuan penggunaan warna huruf untuk file kompilasi regulasi dimaksud:



Contoh:



*Gambar 1: Cuplikan isi dari file kompilasi PKPU tentang seleksi anggota KPU Provinsi & Kabupaten/Kota*

Pasal 25

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), selanjutnya mengikuti tes wawancara.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan.
- (3) Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Bhinneka Tunggal Ika;
  - e. Kepertuhan;
  - f. Ketatanegaraan;
  - g. Keadilan; dan
  - h. Lembaga Penyelenggara Pemilu.
- (4) Tim Seleksi wajib melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam Tes Wawancara, dan menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU.
- (5a) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerlukan data dukung, Tim Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (5b) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diburuhkan.
- (5c) Dalam hal calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara tidak dapat memenuhi kesetaraan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang telah lulus sebuah tahapan seleksi.
- (6) Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengutamakan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (7) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Gambar 2: Cuplikan halaman pertama file Kompilasi PKPU tentang seleksi anggota KPU Provinsi, & Kabupaten/Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



NIDA GUSLAILI RAHMADINA